

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Muhtar (2002), gender merupakan jenis kelamin sosial dalam menentukan peranan sosial berdasarkan jenis kelamin.¹ Sedangkan, menurut Puspitawati (2013), gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya ataupun adat-istiadat. Istilah gender dapat diartikan sebagai sifat, perilaku, maupun peran baik laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial oleh lingkungan dimana seseorang tumbuh atau dibesarkan.²

Menurut Oakley (1972), konsep gender mengacu pada perbedaan jenis kelamin yang tidak bersifat biologis dan tidak melekat pada Tuhan.³ Menurut Haspels dan Suriyasarn (2005) gender adalah variabel sosial yang dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal peran, tanggung jawab, tuntutan, peluang, dan tantangan,⁴ Sedangkan, Organisasi

¹ Muhtar, Y. (2002). *Pendidikan berperspektif keadilan gender*. Depdiknas. Hlm 56.

² Puspitawati, H. (2012). *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press. Hlm 1.

³ Oakley, A. (1972). *Sex, gender, and society*. London: Temple Smith. Reprinted with new Introduction, London: Gower.

⁴ Haspels, N., & B. Suriyasarn. (2005). *Meningkatkan kesetaraan gender dalam aksi penanggulangan pekerja anak serta perdagangan perempuan dan anak panduam praktis bagi organisasi*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan gender sebagai karakteristik yang dibangun secara sosial dari pria dan wanita, seperti standar sosial atau hubungan antara kelompok pria dan wanita.

Merujuk dari pengertian tersebut, peneliti melihat bahwa adanya isu gender berupa bias gender yang tercipta dari konstruksi sosial tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut provinsi dan jenis kelamin di Indonesia tahun 2018, menunjukan bahwa pria 75,43% dan wanita 68,63%. Hal ini menjadi salah satu faktor lebih rendahnya akses pembangunan pada perempuan dalam sektor pendapatan, pendidikan, dan sebagainya. Maka hal ini memicu terjadinya bias gender.⁵

Keadaan ini merupakan kondisi yang memihak atau merugikan. Isu gender ini dapat dikatakan sebagai isu kontemporer dalam Hubungan Internasional. Maka dari itu, isu kesetaraan gender dewasa ini semakin kencang diserukan untuk melawan bias gender tersebut. Kesetaraan gender hadir agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Menurut definisi kesetaraan gender yang diberikan dalam Lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yaitu keadilan gender, kesetaraan gender adalah suatu proses untuk bersikap adil terhadap laki-laki dan perempuan dan dirancang untuk

⁵ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2018, 2019*, <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html#:~:text=Pada%20tahun%202018%2C%20BPS%20mencatat,90%2C99%20pada%20tahun%202018., diakses 5 September 2022>

memerangi ketidaksetaraan gender, yang meliputi stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Kesetaraan gender ini menuntut laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan orang lain untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan sosial budaya, pendidikan, politik, dan lainnya.

Konsep dan definisi kesetaraan gender menurut UN Women, mengarah kepada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan perempuan dan laki-laki. Kesetaraan bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki itu menjadi sama, tetapi setara dalam hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan ini dilihat sebagai isu hak asasi manusia dan prekondisi maupun indikator untuk pembangunan berkelanjutan berbasis manusia.

Raden Adjeng Kartini adalah seorang tokoh dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, mulai tahun 1908. Di Indonesia, perjuangan kesetaraan gender dikenal dengan gerakan “Emansipasi Perempuan”. Salah satu Pahlawan Nasional Indonesia, R.A. Kartini, dikenal bergerak untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Buku "Setelah Gelap Terbitlah Terang" merupakan kompilasi argumentasinya tentang hak-hak perempuan di Indonesia. Hari Kartini diperingati pada tanggal 21 April setiap tahun di Indonesia.

Gerakan ini berasal dari ideologi-ideologi yang berkembang pada masa penjajahan Belanda yang mengakibatkan terbentuknya berbagai organisasi perjuangan. Di zaman penjajahan, akses dalam meraih pendidikan sangatlah sulit

untuk perempuan dan hanya dapat dinikmati oleh kaum bangsawan dan priayi.⁶ Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, tradisi dan kerangka adat cukup kuat dan menghubungkan keberadaan adat dalam berbagai bidang kehidupan. Pria masih memiliki beberapa pilihan pendidikan yang terbatas, tetapi hampir semua wanita tidak bisa. Akibatnya, selama berabad-abad, orang hanya menganggap perempuan sebagai pendamping suami dan pembantu rumah tangga. Oleh karenanya, tokoh yang peduli dengan fenomena itu mulai bermunculan.⁷

Berdasarkan hal tersebut, RA Kartini juga menyatakan banyak pandangan tentang perlunya perjuangan besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penderitaan perempuan. Namun prinsip-prinsip Kartini dianggap tidak penting oleh negara dan masyarakat. Derajat perempuan begitu rendah pada waktu itu sehingga muncul ungkapan *suwargo nurut neroko katut*, yang menandakan bahwa kebahagiaan dan penderitaan istri bergantung pada suami. Wanita sekarang hanya dianggap sebagai jenis kelamin kedua. Ungkapan-ungkapan ini sangat relevan di abad kesembilan belas, ketika perempuan masih dipandang tidak memiliki peran dalam masyarakat. Istilah ini sangat lazim hingga pergantian abad-20.⁸

Dewasa ini, menurut yang peneliti lihat, Indonesia masih berada dalam kategori kurangnya kesadaran akan isu ini dibanding negara-negara lain di berbagai dunia. Menurut data dari Indeks Kesetaraan Gender yang dirilis United Nations

⁶ I. Abdullah, *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pelajar Offset, 2006. Hlm 272-304.

⁷ Kowani, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1978.

⁸ S. S. Soeroto, *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung, 1977. Hlm 5.

Development Programme (UNDP) tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-103.

Kemudian, menurut data terbaru dari laporan The Global Gender Gap Report tahun 2021, posisi Indonesia di ASEAN dalam angka kesetaraan gender menduduki peringkat ke-enam. Sedangkan di dunia, berada pada posisi ke-101 dari 156 negara. Dapat dilihat dari peringkat tersebut bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih rendah.

Selanjutnya, menurut data lain, melalui pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengacu kepada laporan World Economic Forum, Indonesia masih memiliki ketimpangan gender di tahun 2021. Laporan tersebut berisikan bahwa Indonesia memiliki Gender Gap Index sebesar 0,688.⁹ Berdasarkan indeks tersebut, besarnya adalah 1 yang menunjukkan hak antara laki-laki dan perempuan sudah seimbang. Sedangkan, Indonesia masih berada di bawah angka 1, maka dari itu masih adanya ketimpangan gender.

Kemudian, mengacu dalam data lain, yaitu mengacu pada data Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2019, di Indonesia, perempuan menduduki 30% posisi pekerjaan di tingkat manajer dalam sektor publik dan swasta. Indonesia berada pada posisi paling rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, Indonesia berada di bawah Singapura, Laos, Brunei, Thailand, dan Filipina.

⁹ Isna Rifka Sri Rahayu, Sri Mulyani: Ketimpangan Gender di Indonesia Masih Cukup Besar, <https://money.kompas.com/read/2022/04/21/183700126/sri-mulyani--ketimpangan-gender-di-indonesia-masih-cukup-besar?page=all>, 26 Juni 2022.

Selanjutnya, pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender berada di angka 91,27 dan Indeks Pemberdayaan Gender berada di angka 76,26.¹⁰ Hal ini mengalami peningkatan dan jika semakin mendekati 100, maka kesenjangan semakin kecil. Namun, menurut Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N Rosalin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) ini dalam 11 tahun terakhir peningkatannya hampir *flat*, hanya mengalami kenaikan sebesar 0,6 poin. Peringkat Indonesia juga masih berada di dalam 50% kelompok terbawah secara global.¹¹

Isu Kesetaraan Gender ini masuk ke dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Terlebih lagi, isu kesetaraan gender ini pada dasarnya juga merupakan isu hak asasi manusia. Isu ini masuk ke dalam tujuan No.5 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu “*Achieve gender equality and empower all women and girls.*”¹²

Tujuannya untuk, “*Ending all discrimination against women and girls is not only a basic human right, it’s crucial for sustainable future; it’s proven that empowering women and girls helps economic growth and development.*”¹³ Dalam *goals* tersebut disebutkan bahwa isu kesetaraan gender ini merupakan isu penting untuk pembangunan berkelanjutan, karena hal tersebut terbukti bahwa

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hendro Situmorang. *Kesetaraan gender di Indonesia Belum Terbentuk.* <https://investor.id/nasional/289776/kesetaraan-gender-di-indonesia-belum-terbentuk>, 26 Juni 2022.

¹² United Nations, <https://sdgs.un.org/goals/goal5>, diakses 18 November 2021

¹³ United Nations, Op.Cit.

pemberdayaan wanita dan anak membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Agenda atau rencana aksi global yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) diadopsi oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisikan 17 Tujuan dan 169 Target dalam SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030..¹⁴

Melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pembenahan penghentian penambangan liar, restorasi lahan gambut, dan pelaksanaan program substitusi bahan bakar untuk bahan bakar rendah karbon seperti B30 atau penggunaan kendaraan listrik, Indonesia telah menunjukkan peran aktif dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹⁵

Dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2021, sebanyak 64,5 persen dari total UMKM dikelola oleh kaum perempuan.¹⁶ Data tersebut menunjukkan lebih dari setengah total UMKM di Indonesia dikelola

¹⁴ SDGs 2030 Indonesia, <https://www.sdg2030indonesia.org/>, diakses 18 November 2021

¹⁵ Kominfo, *Peran Aktif Indonesia dalam Program Sustainable Development Goals (SDGs)*, <https://kominfo.go.id/content/detail/24712/peran-aktif-indonesia-dalam-program-sustainable-development-goals-sdgs/0/berita>, diakses 4 Juni 2022.

¹⁶ Kemenkopukm, *Menteri Teten: Jumlah Kewirausahaan Perempuan Perlu Ditingkatkan*, <https://kemenkopukm.go.id/read/menteri-teten-jumlah-kewirausahaan-perempuan-perlu-ditingkatkan>, diakses 4 Juni 2022.

oleh perempuan. Oleh karenanya, potensi kekuatan ekonomi perempuan di Indonesia sangat besar dan harus didorong bersama. Maka sebab itu, pemberdayaan perempuan sangat penting.

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pengembangan keterampilan mereka dalam rangka meningkatkan keterlibatan, kewenangan, dan kontrol mereka dalam pengambilan keputusan serta tindakan transformasi untuk memajukan kesetaraan gender yang lebih besar. Melalui pemberdayaan perempuan, perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah, dilakukan upaya untuk memberikan mereka akses dan kontrol atas sumber daya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Melalui pemberdayaan perempuan, maka hal ini dapat meningkatkan peran dan potensi diri wanita agar lebih mampu untuk berkarya dan mandiri. Hal tersebut juga agar pembangunan dapat terasa bagi semua pihak. Pemberdayaan perempuan penting untuk perekonomian negara. Selain sektor perekonomian menjadi lebih *diversify* dalam berbagai aspek, perempuan dapat menjadi aktor strategis dalam pembangunan.

Fenomena ini merupakan fokus utama dalam perspektif feminisme, Menurut Maggie Humm, feminisme diartikan sebagai sekumpulan ide dan pemikiran dalam pembebasan keadaan kaum perempuan terhadap ketidakadilan karena faktor jenis kelamin, selanjutnya dilaksanakan pengkajian-pengkajian dengan beragam pendekatan. Feminisme juga dapat dilihat sebagai gerakan sosial dimana memfokuskan dalam mengatasi masalah-masalah sosial terkait perempuan.

Gerakan feminis didirikan di atas premis bahwa perempuan pada dasarnya dieksploitasi dan ditindas. Selain itu, gerakan ini lahir dari kenyataan bahwa laki-laki mendominasi banyak aspek masyarakat patriarki dan memperlakukan perempuan secara subordinat, yang membuat perempuan bersatu dan memulai gerakan feminis.¹⁷

Menanggapi fenomena ketimpangan gender yang ada, maka munculah sebuah badan atau agensi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk fokus menangani isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women merupakan entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. UN Women mulai beroperasi pada Januari 2011. UN Women adalah anggota dari United Nations Development (UNDP).

Sebagai ahli global untuk perempuan dan anak, UN Women didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mereka di seluruh dunia dengan bekerja untuk mengembangkan dan menegakkan standar dan menciptakan lingkungan di mana setiap perempuan dan anak dapat menggunakan hak asasinya dan memenuhi potensi penuhnya.¹⁸

Di Indonesia, UN Women bekerja dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, sektor publik dan swasta untuk menangani dan menyampaikan prioritas nasional akan kesetaraan gender dan pemberdayaan

¹⁷ Anih Rabbani, *Analisa Kritis Terhadap Konsep Pemikiran Feminis Tentang Perkawinan Beda Agama*. skripsi tidak diterbitkan. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 48-49.

¹⁸ UN Women, *About us*, <https://www.unwomen.org/en/about-us>, diakses 19 November 2021)

perempuan. UN Women berperan untuk memberdayakan perempuan dalam berkontribusi pada komunitas yang lebih baik, lebih aman, dan lebih damai. Di Indonesia, UN Women bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dengan menyediakan akses ke pengembangan keterampilan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian.

Untuk mewujudkan hal tersebut, UN Women membuat rangkaian Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (*Women's Empowerment Principles*) untuk bisnis yang menawarkan panduan tentang bagaimana memberdayakan perempuan di tempat kerja, *marketplace*, komunitas atau masyarakat. Pengembangan *Women's Empowerment Principles* ini mencakup proses konsultasi multi-stakeholder internasional. Pengembangan ini dimulai pada Maret 2009, kemudian diluncurkan pada Hari Perempuan Internasional (*International Women's Day*) pada Maret 2010.

Prinsip-prinsip tersebut menekankan kepada hal bisnis untuk aksi dari korporasi untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan diinformasikan oleh praktik bisnis di kehidupan nyata dan masukan yang dikumpulkan dari seluruh dunia. *Women's Empowerment Principles* ini berusaha untuk menunjukkan jalan menuju praktik terbaik dengan menjelaskan dimensi gender dari tanggung jawab perusahaan dan peran bisnis dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam merancang prinsip-prinsip ini, UN Women berkolaborasi dengan United Nations Global Compact. Prinsip ini juga diadaptasi dari *Calvert Women's Principles*.

1.2. Masalah Penelitian

Pada subbab ini, Peneliti akan memberikan analisis dan penjelasan terkait masalah penelitian dari topik yang dikaji. Subbab ini akan dibagi menjadi 4 (empat) proses yakni: identifikasi masalah, masalah pokok, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian.

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dalam menentukan topik penelitian, peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah terkait topik yang akan peneliti kaji, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi peran UN Women dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.
2. Implementasi terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita di Indonesia melalui penerapan *Women's Empowerment Principles* (Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan).
3. Kesetaraan gender sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

1.2.2. Masalah Pokok

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran UN Women dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia yang masih kurang terbuka dalam isu kesetaraan gender. Penelitian ini terutama berfokus membahas peran UN Women berdasarkan penerapan *Women's Empowerment Principles*.

1.2.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran UN berdasarkan penerapan *Women's Empowerment Principles* (Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan) dalam berkontribusi menciptakan pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender di Indonesia.

1.2.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini memunculkan pertanyaan, yaitu “Bagaimana Peran UN Women dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Berdasarkan Penerapan *Women's Empowerment Principles*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai hasil yang diharapkan oleh peneliti, yaitu:

1. Memberikan gambaran mengenai peran UN Women Indonesia sebagai entitas PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita melalui penerapan *Women's Empowerment Principles (WEPs)*.
2. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi peran UN Women dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

3. Menjabarkan kontribusi yang telah diberikan melalui penerapan *Women's Empowerment Principles (WEPs)* dalam mendorong pemberdayaan ekonomi wanita di Indonesia.
4. Mengidentifikasi implementasi-implementasi perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia melalui *Women's Empowerment Principles (WEPs)*.
5. Meningkatkan kesadaran atau kepedulian masyarakat luas mengenai pentingnya isu kesetaraan gender mengingat isu ini merupakan isu hak asasi manusia serta sebagai salah satu Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang peneliti pakai dalam penelitian ini, di antaranya konsep organisasi internasional, teori feminisme, teori pemberdayaan, dan teori kerja sama internasional. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menerapkan dan mengembangkan kajian hubungan internasional, khususnya mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran atau kepedulian masyarakat luas mengenai pentingnya isu kesetaraan gender, terlebih lagi isu ini sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini juga dapat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini juga diharapkan agar lebih banyak pengaplikasian dari *Women's Empowerment Principles* (WEPs).

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab yang menjelaskan setiap bagian yang diperlukan dalam penelitian. Setiap bagian tersebut memiliki perannya dalam menjelaskan bagian yang dapat membangun logika pemikiran dan juga memberikan gambaran berupa alur pembatasan yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

Dimana **Bab I** terdiri dari **PENDAHULUAN** yang menjelaskan mengenai latar belakang dari masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berisikan tentang penjabaran mengenai pemahaman mengenai konsep gender, kesetaraan gender, sejarah kesetaraan gender, posisi dan isu kesetaraan gender di Indonesia, pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, pengenalan organisasi UN Women beserta programnya, dan penjabaran terkait *Women's Empowerment Principles* UN Women dalam pemberdayaan ekonomi wanita.

Pada **Bab II** terdiri dari **KAJIAN PUSTAKA**, yang mana berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian

terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai acuan untuk menambah informasi serta memberikan gambaran mengenai teori yang sesuai dengan pembahasan yang akan diangkat dalam bab ini dan juga nantinya akan digunakan dalam menganalisis masalah yang diangkat.

Pada **Bab III** terdiri dari **METODOLOGI PENELITIAN**. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan sistematika penulisan melalui pendekatan penggunaan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan cara pengelolaan atau analisis data.

Pada **Bab IV** terdiri dari **HASIL DAN PEMBAHASAN**. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan mengenai hasil penelitian yang peneliti dapatkan dan terbagi menjadi beberapa sub bab. Kemudian, hasil penelitian tersebut di analisis dalam sub bab pembahasan.

Pada **Bab V** sebagai **PENUTUP** terdiri dari kesimpulan dan saran. Peneliti memberikan kesimpulan sebagai ringkasan dari hasil penelitian dan pembahsan serta saran untuk para pembaca.

Terakhir adalah **DAFTAR PUSTAKA**. Dalam bab ini, berisikan referensi sumber penelitian, baik dari buku, jurnal, karya ilmiah, laporan data, data-data dari internet, dan *website* resmi.